

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan kondisi eksisting halte yang ada pada Kabupaten Cirebon belum memenuhi standar pedoman teknis diketahui masih memiliki kelengkapan fasilitas seperti tidak adanya papan identitas halte, rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, pagar, telepon umum, tempat sampah.
2. Dari kondisi eksisting halte yang terdapat pada trayek yang dikaji sebanyak 2 halte. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan halte di Kabupaten Cirebon, dengan melalui perhitungan dan tata guna lahan dibutuhkan penambahan halte sejumlah 21 halte pada kantong penumpang di sepanjang jalan yang dilalui trayek angkutan pedesaan. Di dapatkan lokasi halte yang ideal berdasarkan pedoman teknis dan kantong penumpang khususnya di trayek angkutan pedesaan sumber – plered dan sumber - kramat di Kabupaten Cirebon.
3. Berdasarkan analisis perhitungan ukuran minimum halte yang terdapat pada segmen – segmen yang akan dibangun halte ternyata belum sesuai dengan standar, maka digunakanlah ukuran yang sesuai dengan SK Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 yaitu dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter dengan tinggi yang diusulkan 2,5 meter.

#### **6.2 Saran**

1. Dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan umum khususnya pada trayek angkutan pedesaan di kabupaten Cirebon, maka diperlukan pengadaan fasilitas prasarana tempat pemberhentian angkutan umum seperti halte. Sehingga masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut menjadi lebih nyaman dan dapat terlayani dengan baik.

2. Penempatan lokasi fasilitas tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum harus disesuaikan dengan analisis penentuan lokasi yang terdapat pada titik – titik kantong penumpang. Dengan demikian diharapkan prasarana halte yang dibangun dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat menunggu dan tempat naik turun penumpang angkutan pedesaan di Kabupaten Cirebon.
3. Melakukan penyesuaian terhadap dimensi halte pada tiap segmen sesuai hasil analisis dimensi halte.